



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 104 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Rencana. . .

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2024; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Agustus 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1231

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 memiliki peran penting dalam perencanaan strategis. Dokumen Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024, merupakan penjabaran Renstra Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024, diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara

konstruktif mendukung proses pembangunan di Kota Batam. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapelitbangda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bapelitbangda Kota Batam dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi.

Batam, Juli 2023
Kepala Badan Perencanaan dan
Penelitian Pengembangan
Pembangunan Daerah Kota Batam



Dahlina Nopilawati, S.T
Pembina Tk.I
NIP. 19751121 200212 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi-i

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 7

TAHUN 2022 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah22

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH47

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional47

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah48

3.3 Program dan Kegiatan48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH62

BAB V PENUTUP82

5.1 Catatan Penting82

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan82

5.3 Rencana Tindak Lanjut82

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Tahapan Proses Penyusunan Renjai

GAMBAR 2 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan lainnyaii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Kota
Batam.....13

TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....29

TABEL 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 202434

TABEL 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 202450

TABEL 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2024, Prakiraan maju Tahun 2025.....56

TABEL4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Bapelitbangda66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah disusun dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11) Nomor 25 Tahun 2004, Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra PD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Bapelitbangda Kota Batam melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2024 melalui tahapan – tahapan :

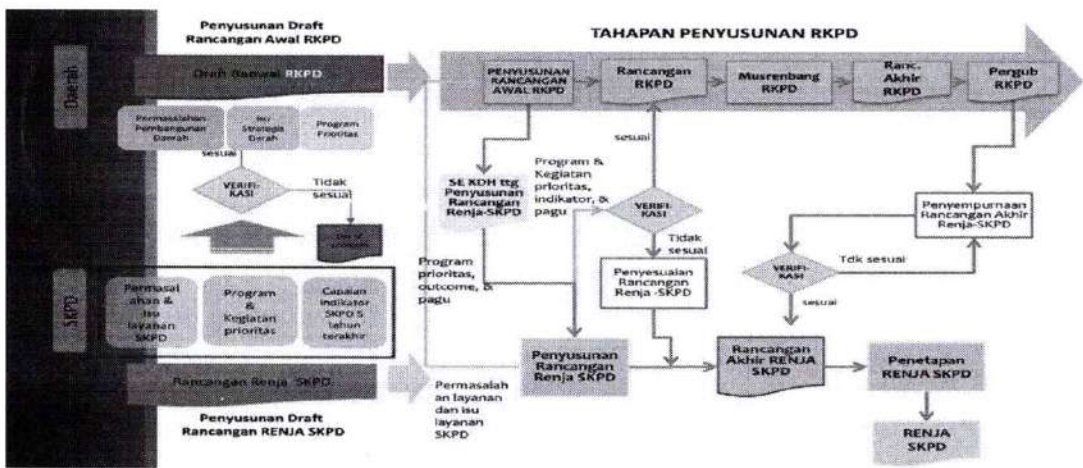
- 1) Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusunan Renja Bapelitbangda TA 2024
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2022, pengendalian kegiatan Tahun 2022 , dan RKPD 2024)
- 2) Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti
 - Desk dengan pengampu kegiatan
- 3) Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bapelitbangda TA 2024
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, dan Pemangku Kepentingan yang terkait

- 5) Perumusan rancangan akhir
- Penyempurnaan oleh Tim
 - Diverifikasi oleh Mitra OPD
 - Penetapan Renja

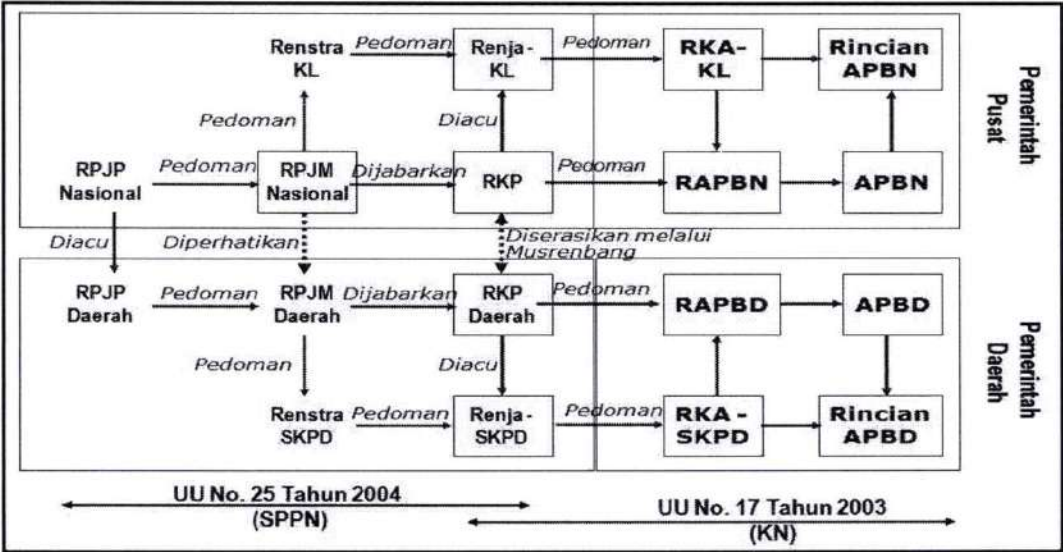
Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penyusunan RKPD Kota Batam dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Secara sistematis proses Penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam dapat dijelaskan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar.1
Tahapan Proses Penyusunan Renja



Gambar. 2
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran

Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah. Kota Batam Nomor 127);

8. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 891);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1072) ;
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bapelitbangda untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana kerja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2022, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, antara lain :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja PD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2022 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Bapelitbangda pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Batam Tahun Anggaran 2022. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2022, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 13.248.931.210,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 13.061.845.210,- dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.509.165.625,-
 - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.552.679.585,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 187.086.000,-

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Bapelitbangda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, seperti belanja mebeleur dan komputer.

Selanjutnya pada APBDP Tahun anggaran 2022, Bapelitbangda Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp.13.595.576.924,- yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 13.362.490.924,- dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.004.010.339,-
 - b. Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 3.358.480.585,-

2. Belanja Modal sebesar Rp. 233.086.000,-

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bapelitbangda pada APBD TA. 2022 dan APBDP TA. 2022 terdiri dari 4 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Hasil pencapaian kinerja Renja dan Renstra Bapelitbangda Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2.1/ T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan dan Penelitian,
Pengembangan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan dan
Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah s/d Tahun 2023 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegia tan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realis asi Targe t Kinerj a Hasil Progr am dan Kelu ran Kegia tan s/d Tahu n (n- 3)/ Tahu n 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 / (n-2)			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1)/ Tahun 2023	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) /Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n- 2)/ Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan /n-1 (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5,01	URUSAN PERENCANAAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 dok		3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100.00%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		100%		100%		100%	100.00%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan		43 Orang/Bulan		43 Orang/Bulan		49 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen		30 Dokumen		30 Dokumen		396 Dokumen	396 Dokumen

5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1 Paket	1 Paket		1 Paket
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	11 paket	11 paket		11 paket
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket		4 Paket
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan		52 Laporan	52 Laporan	30 laporan	30 laporan		30 iaporan
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%		100.00%
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket		3 Paket

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
5.01.01.2.07	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit		41 Unit	41 Unit	41 Unit	49 unit	49 unit	49 unit

5.01	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.00%		90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	100.00%
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	43 BA		43 BA	43 BA	43 BA	43 BA	43 BA	43 BA
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA		1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang data dan informasi perencanaan pembangunannya lengkap	100%		100%	100%	100%	100%	100%
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	204 orang	204 orang	204 orang	204 orang	190 Orang	190 Orang	190 Orang
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat daerah di lingkungan Pemko Batam yang dievaluasi dokumen perencanaannya yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

5.01.02.2. 03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
		2. Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
		3. Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

		tepat waktu											
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 OPD		15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	100.00%	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen

5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15 Laporan	15 Laporan
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD

5.01.03.2. 02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah bidang Perekonomian yang menyusun dokumen perencanaan	PD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
5.01.03.2. 02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian		10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah
5.01.03.2. 02.04	Koordinasi Pelaksanaan dan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan
5.01.03.2. 03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan		18 OPD	18 OPD	18 OPD	18 OPD	18 OPD	18 OPD	18 OPD

		Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan								
5.01.03.2. 03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen
5.01.03.2. 03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah
5.01.03.2. 03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	Percentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100.00%

5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian, Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/dilaksanakan/difasilitasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang difasilitasi	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	2 penelitian	2 penelitian	2 penelitian
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial dan Kependudukan	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	1 penelitian/kajian	1 Inovasi dan Teknologi	1 Inovasi dan Teknologi	1 Inovasi dan Teknologi
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian/kajian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Inovasi dan Teknologi	2 Laporan	2 Laporan
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan/dikembangkan							2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
5.05.02.2.04.03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif							2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda

Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, Bapelitbangda Kota Batam sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi, baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Untuk mencapai visi dan misi, Bapelitbangda Kota Batam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Batam merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bapelitbangda dengan program tingkat Kota Batam menjadi mutlak.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bapelitbangda melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

1. fungsi perencanaan; dan
2. fungsi penelitian dan pengembangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2022, Bapelitbangda Kota Batam didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, dan ketersediaan anggaran. Kinerja pelayanan Bapelitbangda Kota Batam yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan fokus pada :

1. perumusan kebijakan
2. bimbingan
3. konsultasi dan koordinasi
4. monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
5. penyusunan kajian/penelitian.

Sesuai dengan kewenangan di atas, secara umum jenis pelayanan berdasarkan output yang diberikan oleh Bapelitbangda terdiri dari:

1. Pelayanan penyusunan dokumen RPJPD
2. Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD
3. Pelayanan penyusunan dokumen RKPD
4. Pelayanan penyusunan dokumen Renstra
5. Pelayanan penyusunan dokumen Renja
6. Pelayanan monitoring dan evaluasi hasil perencanaan
7. Pelayanan kelitbang

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bapelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kota, maupun horizontal yakni antar PD;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi, data dan informasi pembangunan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bapelitbangda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah :

1. Unsur Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi

- dan integrasi program;
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
 4. Masyarakat dalam hal penyediaan informasi perencanaan pembangunan;

Tabel 2. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1.	Pemikiran strategis di bidang perencanaan	Unsur Pimpinan (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda)
2.	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi	Perangkat Daerah
3.	Penjaringan aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.	Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)

Pengukuran kinerja pelayanan Bapelitbangda dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu juga untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *minimal outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tabel.2.2/ Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbangda
Kota Batam

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA BAPELITBANGDA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	10					
1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90%	98%	98%	98%	94%		98%	98%		
2	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
3	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		

4	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
6	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapelitbangda

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Bapelitbangda Kota Batam memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan melalui strategi operasional yang diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bapelitbangda Kota Batam.

Untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Sedangkan rumusan kebijakan dalam konteks organisasional Bapelitbangda Kota Batam mengacu pada Renstra Bapelitbangda Kota Batam yang tidak terlepas dari RPJMD Kota Batam. Adapun strategi Bapelitbangda Kota Batam untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bapelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang memadai;
2. Membangun dan mengembangkan mekanisme perencanaan dan evaluasi dokumen perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan sistem evaluasi perencanaan pembangunan (SEPP);
3. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel;
5. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bapelitbangda;
6. Memanfaatkan *database* pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;
7. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;
8. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum terbentuk;

9. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan;
10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan; dan
11. Mensinergikan antara perencanaan Sektorial dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW.

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda pada kurun periode Renstra 2021-2026, khususnya pada Tahun Anggaran 2022, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan perencanaan partisipatif, yang didukung dengan aplikasi e-planning pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Batam, sehingga dapat tercipta konsistensi dan sinkronisasi yang lebih baik antara usulan masyarakat dan prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam;
2. Tersedianya aplikasi evaluasi dokumen perencanaan (SEPP);
3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan PD dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah;
4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Adapun beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan di daerah. Kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinamis dikarenakan seringnya perubahan peraturan perundang-undangan terkadang kurang tersosialisasi secara baik di tingkat daerah, kondisi ini mengakibatkan kurangnya pemahaman aparatur yang mengakibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak optimal
2. Belum optimalnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya pelaksanaan bimtek/workshop penyusunan perencanaan dan adanya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Kuantitas dan kualitas aparatur memegang peranan penting untuk melaksanakan tugas perencanaan.

3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi tiap-tiap aparatur perencana di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan berpotensi menimbulkan permasalahan dan kendala dalam menyusun dan melaksanakan dokumen perencanaan.

4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.

Ketersediaan sistem data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi serta memonitoring perencanaan yang sedang dijalankan. Adanya sistem informasi dan data yang akurat akan mempermudah aparatur perencana pada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perkembangan Bapelitbangda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bapelitbangda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Bapelitbangda melaksanakan 4 (empat) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Namun terdapat perubahan Sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dari Rancangan Awal RKPD yang bisa terlihat dari tabel TC-31 sebagai berikut:

Tabel 2.3 T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KOTA BATAM

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN					BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH					
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
PERENCANAAN				17,280,892,189					20,842,101,566	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	16,669,409,627	PERENCANAAN				20,495,997,566	
				14,206,877,002	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	18,006,868,036	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	3 Dokumen	260,263,991	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	176,545,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	25,835,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	160,263,991	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	150,710,000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10,668,225,811	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13,399,310,108	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	10,624,785,811	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	13,354,870,108	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	492 dokumen	43,440,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	492 dokumen	44,440,000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	362,441,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang	100%	845,654,600	

		Perangkat Daerah yang terlaksana						terlaksana			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	162,441,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	88,080,000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 orang	757,574,600		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 orang	100,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,011,048,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,324,513,100		
Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	12,692,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	17,300,000		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	900,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	447,919,500	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	83,356,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	92,071,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	115,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	54,345,600	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 laporan	900,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 laporan	1,712,877,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	89,922,000	
Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	100,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	89,922,000	

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	560,513,200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	543,154,528
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 laporan	76,110,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 laporan	64,590,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 laporan	484,403,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 laporan	478,564,528
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	244,385,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	627,768,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas dan Pajak Kendaraan Perorangan	1 unit	38,280,000

		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	212,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	246,786,000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 Unit	32,385,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 Unit	33,680,000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 Unit	309,022,700		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Batam	Persentase Keselarsa n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	98%	1,513,883,2 95	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Batam	Persentase Keselarsan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98%	2,234,360,000		

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Batam	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	1,145,187,295	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Batam	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	1,805,861,000	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Tenokratik)	1 dok tenokratik RPJMD	300,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Batam	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Tenokratik)	1 dok tenokratik RPJMD	234,076,500	
Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	Kota Batam	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat daerah/Lintas Daerah	43 BA Forum PD dan 1 BA RPJPD	150,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	Kota Batam	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat daerah/Lintas Daerah	43 BA Forum PD dan 1 BA RPJPD	197,110,500	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA Musrenbang RKPD dan 1 BA Musrenbang RPJPD	550,187,295	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA Musrenbang RKPD dan 1 BA Musrenbang RPJPD	735,147,000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen RKPD dan 1 dok RPJPD	145,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen RKPD dan 1 dok RPJPD	639,527,000	

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Batam	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	100%	135,000,000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Batam	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	100%	214,294,000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan SKPD	Kota Batam	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	208 Orang	135,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Batam	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi	208 Orang	214,294,000
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Batam	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	100%	233,696,000	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Batam	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	100%	214,205,000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	200,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	214,205,000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	33,696,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Batam	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	359,813,970	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Batam	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	84,959,530
	Kota Batam	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	244,312,992		Kota Batam	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	46,272,000
	Kota Batam	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang menyelesaikan	100%	344,522,368		Kota Batam	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan	100%	123,538,000

		Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu							tepat waktu			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 PD	359,813,970	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	15 PD	84,959,530			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 dok	43,775,835	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63 dok	19,510,030			
								(4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)			(4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42 dokumen	85,603,210	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42 dokumen	18,528,500	
			(4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)					(4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	9 Laporan	94,398,755	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	9 Laporan	3,364,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	136,036,170	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	43,557,000	

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonom ian dan SDA yang telah menyelesai kan Dokumen Perencanaa n sesuai ketentuan	10 PD	244,312,99 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	10 PD	46,272,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an yang dikoordinir penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49 Dokumen (4 tahap murni Renja, 3 tahap perubahan Renja)	49,828,998	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49 Dokumen (4 tahap murni Renja, 3 tahap perubahan Renja)	5,610,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen (4 tahap murni Renja, 3 tahap perubahan Renja)	71,561,998	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21 Dokumen (4 tahap murni Renja, 3 tahap perubahan Renja)	7,574,000	

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	7 Laporan	61,835,998	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	7 Laporan	19,800,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	3 Laporan	61,085,998	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	3 Laporan	13,288,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	18 PD	344,522,368	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	18 PD	123,538,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan	35 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	81,989,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir Penyusunanya (RPJPD, RPJMD dan	35 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	34,322,000

		ya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		91 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	98,033,000		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir Penyusunan ya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	32,353,000		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	5 Laporan	100,407,000			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	5 Laporan	24,231,000		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	13 Laporan	64,093,368			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Batam	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	13 Laporan	32,632,000		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kota Batam				611,482,562.35	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kota Batam			346,104,000.00		

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Batam	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti sebagai <i>policy brief</i>	50%	611,482,562.35	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Batam	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti sebagai <i>policy brief</i>	50%	346,104,000.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Batam	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi	1 dokumen	10,000,000.00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Batam	jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanakan/ difasilitasi	1 dokumen	16,792,000.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	10,000,000.00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	16,792,000.00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Batam	Indeks inovasi daerah	54	601,482,562.35	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Batam	Indeks inovasi daerah	54	329,312,000.00

Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 laporan	601,482,562.35	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Batam	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 laporan	329,312,000.00
--	------------	---	-----------	----------------	--	------------	---	-----------	----------------

2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberi usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu usulan Perencanaan Pembangunan juga berasal dari Kunjungan Kerja Walikota batam dan melalui Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Batam yang telah diterima akan dilakukan penginputan melalui Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh pihak Kelurahan/Kecamatan yang dikoordinir dan diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Usulan tersebut akan diteruskan ke PD terkait untuk dilakukan penyusunan Renja PD tersebut. Namun untuk program/Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Bapelitbangda, tidak terdapat usulan yang berasal dari masyarakat.

Tabel T-C.32.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

TAHUN 2024 KOTA BATAM

No.	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volum e	Catata n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
		N I H I L			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPELITBANGDA

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan;

Kerangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan , yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Meningkatkan stabilitas politik,hukum,pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Sesuai tugas pokok Bapelitbangda sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Daerah yaitu memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan sesuai dengan kewenangannya, maka merupakan tugas wajib Bapelitbangda untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama Visi Kota Batam tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.”

Berdasarkan visi tersebut, maka Bapelitbangda Kota Batam mendukung Misi 5, yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bapelitbangda Kota Batam mengidentifikasi tujuan sebagai berikut:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.”

Adapun sasaran Renja Bapelitbangda Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangsan dalam mendukung perencanaan
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pemilihan program-program pembangunan yang dilakukan dalam Rencana Kerja Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Bapelitbangda merupakan Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi: fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut telah ditetapkan program/kegiatan. Adapun prioritas program Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

I.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

I.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

I.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

I.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

I.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

I.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor Bangunan lainnya
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

II.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

II.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

II.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

III.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

III.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

III.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

IV.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

IV.2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Tabel 3.1 T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024,

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA BATAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				20,842,101,566				19,872,041,644.10
5,01					20,495,997,566				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	18,006,868,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	19,259,030,375.34 17,091,046,418.98
5.01.01.2.01	KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Kota Batam	3 Dokumen	176,545,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100%	260,914,650.98
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Batam	2 Dokumen	25,835,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	100,250,000.00

5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kota Batam	1 Laporan	150,710,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	160,664,650.98
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	13,399,310,108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	13,543,548,600.00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	47 Orang/bulan	13,354,870,108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47 Orang/bulan	13,500,000,000.00
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	60 dokumen	44,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 dokumen	43,548,600.00
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	845,654,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	363,347,102.50
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kota Batam	2 Paket	88,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Paket	162,847,102.50
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	55 orang	757,574,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 orang	100,250,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	55 orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 orang	100,250,000.00
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	2,324,513,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	2,016,075,620.00

5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	17,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	12,723,730.00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Batam	7 paket	447,919,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 paket	902,250,000.00
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Batam	4 Paket	92,071,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	83,564,390.00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Batam	1 Paket	54,345,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	115,287,500.00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	52 laporan	1,712,877,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52 laporan	902,250,000.00
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	89,922,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100,250,000.00
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Batam	2 Unit	89,922,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	100,250,000.00
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	543,154,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	561,914,483.00
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Batam	2 laporan	64,590,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 laporan	76,300,275.00

5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kota Batam	12 laporan	478,564,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 laporan	485,614,208.00
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	627,768,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	244,995,962.50
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	38,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	38,375,700.00
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	7 Unit	246,786,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	174,154,300.00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	41 Unit	33,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41 Unit	32,465,962.50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	309,022,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		95%	2,234,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95%	1,216,918,003.00
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Batam	100%	1,805,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	847,300,263.00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Tenokratik)	Kota Batam	1 dok teknokratik RPJMD	234,076,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dok teknokratik RPJMD	-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Batam	43 BA Forum PD dan 1 BA RPJPD	197,110,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43 BA Forum PD dan 1 BA RPJPD	150,375,000.00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 BA Musrenbang RKPD dan 1 BA Musrenbang RPJPD	735,147,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 BA Musrenbang RKPD dan 1 BA Musrenbang RPJPD	551,562,763.00
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Batam	2 dokumen RKPD dan 1 dok RPJPD	639,527,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 dokumen RKPD dan 1 dok RPJPD	145,362,500.00

5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	Kota Batam	100%	214,294,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	135,337,500.00
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang dibina dalam Pemanfaatan data dan Informasi		190 Orang	214,294,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	190 Orang	135,337,500.00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	Kota Batam	100%	214,205,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	234,280,240.00
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Batam	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	214,205,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 laporan (laporan evaluasi RPJMD, RKPD dan P-RKPD)	200,500,000.00
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Batam			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	33,780,240.00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		100%	84,959,530		100%	360,713,504.94

		Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		100%	46,272,000		100%	244,968,774.50
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan		100%	123,538,000		100%	345,383,673.92
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam	15 PD	84,959,530		15 PD	360,713,504.94
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	63 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	19,510,030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63 dok (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	43,885,274.59
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	Kota Batam	9 Laporan	3,364,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Laporan	94,634,751.89

5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	42 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	18,528,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	85,817,218.03
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	Kota Batam	6 Laporan	43,557,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	136,376,260.43
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam	10 PD	46,272,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 PD	244,968,774.50
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	49 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	5,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	49,953,570.50
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	Kota Batam	7 Laporan	19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Laporan	61,990,588.00

5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	21 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	13,288,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21 Dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	71,740,903.00
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA		3 Laporan	7,574,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	61,283,713.00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam	18 PD	123,538,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 PD	345,383,673.92
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	35 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	34,322,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	82,193,972.50
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	Kota Batam	5 Laporan	24,231,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	100,658,017.50
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Batam	91 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	32,353,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	91 dokumen (4 tahapan murni Renja, 3 tahapan perubahan Renja)	98,278,082.50

5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	Kota Batam	13 Laporan	32,632,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Laporan	64,253,601.42
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti sebagai policy brief		50%	346,104,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50%	613,011,268.76
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang terealisasi	Kota Batam	1 dokumen	16,792,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	10,025,000.00
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Batam	1 Laporan	16,792,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10,025,000.00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Indeks inovasi daerah	Kota Batam	54,00	329,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54,00	602,986,268.76
5.05.02.1.04.03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Kota Batam	1 laporan	329,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 laporan	602,986,268.76

[illegible]

					Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% Persen	12 Laporan	100% Persen	478.564.528,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	485.614.208,00
5	0	0	0	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									244.995.962,50
5	0	0	0	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi undefined	100% Persen	1 Unit	100% Persen undefined undefined	38.280.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.375.700,00
5	0	0	0	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi undefined	100% Persen	7 Unit	100% Persen undefined undefined	246.786.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	174.154.300,00
5	0	0	0	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi undefined	100% Persen	41 Unit	100% Persen undefined undefined	33.680.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	32.465.962,50
5	0	0	0	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

	1	1				Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% Persen	1 Unit	100% Persen undefined	309.022.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direrehabilitasi	1 Unit	0,00
5	0	0	2.09	0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										0,00
						Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100% Persen	1 Unit	100% Persen undefined	0,00	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direrehabilitasi	1 Unit	0,00
5	0	0					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										1.216.918.003,00
5	0	0	2.01				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan										847.300.263,00
5	0	0	2.01	0001			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah										
						Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	1 Dokumen	100 %	234.076.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	0,00
5	0	0	2.01	0004			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah										
						Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	43 Berita Acara	100 %	197.110.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	43 Berita Acara	150.375.000,00

5	0	0	2	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota				100 %	735.147.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	551.562.763,00
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	1 Berita Acara				
5	0	0	2	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	639.527.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	145.362.500,00
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	2 Dokumen				
5	0	0	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					214.294.000,00				135.337.500,00
5	0	0	2	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				100% Persen	214.294.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	190 Orang	135.337.500,00
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase data PD yang dimutakhirkan sesuai standar data daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98% Persen	190 Orang				
5	0	0	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					214.205.000,00				234.280.240,00
5	0	0	2	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota				100% Persen	214.205.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	200.500.000,00
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase indikator program yang mendukung program prioritas pembangunan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98% Persen	3 Laporan				
5	0	0	2	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				100% Persen	0,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	33.780.240,00
						Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan	Persentase indikator program yang mendukung program	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98% Persen	1 Laporan				

					Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah yang Dikoordinir oleh (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Perangkat Daerah dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	42 Dokumen	15 PD	18.528.500,00	PENDAPAT AN /ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42 Dokumen	85.817.218,03
5	0	0	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											

					Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan ketuntasan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan ketuntasan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	1 Laporan	15 PD	43.557.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	136.376.260,43
5	0	0	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											244.968.774,50
5	0	0	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							46.272.000,00				
	1	3														
	1	3														

5	0	0	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Peringkat Daerah Perencanaan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah Perencanaan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	7 Laporan	10 PD	19.800.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perencanaan	7 Laporan	61.990.588,00
---	---	---	------	------	---	--	--	---	---	-------------------------	-----------	-------	---------------	-------------------------------	--	-----------	---------------

5	0	0	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	100 % 100 % 100 %	5 Laporan	18 PD	24.231.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	100.658.017,50
---	---	---	------	------	---	--	--	--	---	-------------------------	-----------	-------	---------------	-------------------------------	--	-----------	----------------

5	0	0	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir a (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 %	91 Dokumen	18 PD	32.353.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir a (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	91 Dokumen	98.278.082,50

					Persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	jumlah penelitian dan pengembang an bidang penyelenggar aan pemerintaha n dan pengkajian peraturan yang di susun/ dilaksanak an/difasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	50% Persen	1 Laporan	1 Dokumen	16.792.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Lapora n	10.025.000,00
5	0	0	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							329.312.000,00				602.986.268,76
5	0	0	2	2.04	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif											
					Persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti sebagai policy brief	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintah n Daerah yang Bersifat Inovatif	Indeks inovasi daerah	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	50% Persen	1 Laporan	54 Nilai	329.312.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Lapora n	602.986.268,76
											TOTAL	20.842.101.566,00				19.872.041.644,10

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengoptimalisasi pemanfaatan serta pengembangan berbagai potensi yang ada di lingkungan Bapelitbangda Kota Batam. Selanjutnya, secara langsung dapat mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2024 adalah:

- a. Renja Bapelitbangda Tahun 2024 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026; dan
- b. Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2024 menjadi pedoman Bapelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bapelitbangda Tahun 2024 .

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SEPP) dan Sistem Monitoring, Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota Batam;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI